

## BAB II

### AWAL MULA LAHIRNYA PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

#### A. Gagasan Awal Pembentukan Perpustakaan Nasional RI

Perpustakaan merupakan tempat tersedianya berbagai macam bahan penerbitan yang diatur dengan suatu sistem tertentu untuk keperluan informasi ilmiah, populer dan umum. Dapat dikatakan bahwa salah satu ciri kemajuan suatu bangsa dalam bidang penelitian dan pendidikan adalah dengan melihat lengkap tidaknya koleksi perpustakaan dan pusat dokumentasi ilmiah. Saat ini, hampir di setiap negara terdapat Perpustakaan Nasional yang tidak hanya dijadikan sebagai monumen suatu bangsa. Namun, dibangun juga dengan tujuan untuk mewadahi kebutuhan informasi baik untuk waktu dekat ataupun untuk masa yang akan datang. Perpustakaan dapat menjadi salah satu pintu menuju kecerdasan suatu bangsa. Dengan adanya Perpustakaan Nasional akan terjamin, antara lain pengumpulan, pengaturan serta perawatan penerbitan-penerbitan nasional dari waktu ke waktu guna keperluan pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya suatu bangsa.

Di Indonesia, ide untuk memusatkan semua terbitan baik dari Hindia Belanda maupun sifatnya internasional telah ada sejak tahun 1913. Terbukti dengan penunjukan perpustakaan di Museum *Koninklijke Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (KBGKW) sebagai perpustakaan deposit untuk menampung seluruh cetakan di Indonesia pada tahun 1913. Kemudian, pada 1948 PBB menunjuk perpustakaan tersebut sebagai pusat terbitan deposit PBB dan cabang-

cabang khususnya seperti WHO, UNESCO, dan sebagainya. Keberadaan perpustakaan yang berskala lokal pun telah banyak terutama perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan dengan mengusahakan adanya perpustakaan sekolah di berbagai tingkat. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan pendirian Yayasan Hatta pada tahun 1950<sup>1</sup> dengan tujuan untuk membantu pembentukan perpustakaan berwawasan nasional yang juga bersifat universal. Selain itu, yayasan yang didirikan di Jakarta dengan akta notaris Suwandi S.H ini bertujuan untuk menyelenggarakan serta membantu mengumpulkan bahan ilmu pengetahuan dan kebudayaan seluas-luasnya terutama ilmu pengetahuan dan kebudayaan Indonesia secara khusus dan dunia timur pada umumnya.

Keberadaan berbagai perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan termasuk Yayasan Hatta merupakan bentuk dukungan dan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia memerlukan sebuah perpustakaan yang berskala nasional. Kondisi ini pun semakin ditunjang lagi dengan adanya Keputusan Kepala Jawatan Pendidikan Masyarakat (Japenmas) Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 10244/Kab, tertanggal 26 November 1953 tentang Peraturan Penyelenggaraan Perpustakaan Rakyat Jawatan Pendidikan Masyarakat. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa urusan perpustakaan rakyat jawatan pendidikan masyarakat diatur oleh Bagian Perpustakaan Rakyat yang bertugas mengatur organisasi dan perkembangan seluruh perpustakaan rakyat. Perpustakaan rakyat merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Kustiniyati Mochtar, *Sosok Pribadi Unik Mastini Hardjoprakoso*, (Jakarta : Yayasan Kawedri, 1994), hal. 41

taman bacaan yang berisi bacaan-bacaan yang bersifat kedaerahan, nasional dan bersifat internasional. Keputusan itu adalah salah satu upaya pengembangan perpustakaan lokal untuk mendukung berdirinya sebuah perpustakaan nasional di negara Indonesia.

Langkah nyata pun semakin digiatkan ketika pada tanggal 25-27 September 1954 diselenggarakan Konferensi Perpustakaan seluruh Indonesia pertama. Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia muncul gagasan dan pemikiran perlunya sistem nasional perpustakaan yang disampaikan oleh Prof. Muhammad Yamin selaku menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia. Hasil yang diperoleh dalam konferensi itu adalah:

1. Mendorong berdirinya perkumpulan ahli perpustakaan seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya perkumpulan ahli perpustakaan maka pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpustakaan semakin tinggi. Jika kondisi tersebut sudah terjadi maka rasa cinta terhadap perpustakaan dan buku akan tertanam juga. Perkumpulan ini juga menjadi wadah perjuangan bagi ahli perpustakaan untuk memasyarakatkan buku dan perpustakaan.
2. Perlu adanya pendidikan ahli perpustakaan agar semakin banyak rakyat Indonesia yang mengerti dan paham tentang penyelenggaraan perpustakaan. Seperti jenis pendidikan dalam ilmu lain, kebutuhan akan pendidikan ilmu perpustakaan diharapkan bisa melahirkan pustakawan-pustakawan yang profesional serta untuk memasyarakatkan ilmu perpustakaan.

3. Perlu adanya suatu Badan Koordinasi dan Penasehat yang disebut Dewan Perpustakaan Nasional (DPN). Badan ini bertugas sebagai pemikir dan perencana pembentukan sistem nasional perpustakaan. Dewan Perpustakaan Nasional ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia dengan nomor 1728/kab/1955 tertanggal 25 Maret 1955 dan diketahui oleh Perdana Menteri Indonesia.

Hasil kerja Dewan Perpustakaan Nasional (DPN) yang penting adalah dicantumkan rencana pembentukan Perpustakaan Nasional dalam Rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana 8 tahun yang menjadi dasar pencapaian pendirian Perpustakaan Nasional.

4. Mendirikan perpustakaan-perpustakaan umum untuk lebih mendekatkan masyarakat dengan buku dan perpustakaan. Keberadaan perpustakaan umum inilah yang kemudian menjadi cikal bakal perpustakaan wilayah.
5. Mengupayakan kerjasama antar perpustakaan di Indonesia. Hal ini penting agar setiap perpustakaan bisa saling melengkapi baik dalam hal koleksi bahan pustaka maupun sarana-prasarananya.

Satu demi satu pencapaian pun terlaksana ketika pada tahun 1960 MPRS mengeluarkan TAP MPRS Nomor I dan II tahun 1960 yang menyatakan bahwa di Kotaprdaja Djakarta Raya akan didirikan Perpustakaan Nasional. Lalu tahun 1966, disusunlah Rancangan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia tentang pembentukan Perpustakaan Nasional.

Seiring dengan semakin kuatnya tekad dan kebutuhan akan pentingnya

keberadaan perpustakaan nasional, maka semakin banyaklah pihak-pihak yang mendukung pendirian perpustakaan nasional. Salah satu pihak yang peduli terhadap upaya pendirian perpustakaan nasional adalah Mastini Hardjoprakoso yang menghasilkan karya tulis ilmiah tentang perlunya sebuah perpustakaan nasional di Indonesia.

Mastini Hardjoprakoso yang saat itu menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Museum Pusat, menulis kertas kerjanya dengan tajuk "*The Needed of a National Library in Indonesia*" pada tahun 1971 di Hawaii<sup>2</sup> ketika sedang menyelesaikan program pendidikannya. Kertas kerja ini baru diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "*Pentingnya Perpustakaan Nasional Bagi Bangsa Indonesia*" pada 1973 dan diserahkan kepada pemerintah. Dalam tulisannya tersebut, Mastini membahas secara rinci mengenai fungsi, struktur lembaga perpustakaan baik yang ada di negara-negara maju dan negara berkembang, tata laksana serta memberi saran praktis mengenai gedung perpustakaan. Selain menuliskan kertas kerja tersebut, Mastini juga menulis beberapa artikel terkait tentang dasar-dasar pemikiran pembentukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yakni<sup>3</sup>:

1. Perlu tersedia informasi dunia yang lengkap dan mutakhir secara efisien. Ini penting mengingat perkembangan peningkatan informasi dunia dalam abad 20 ini sangat tinggi sehingga untuk menanggulangnya perlu mendirikan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia agar segala dana dan daya nasional yang terbatas

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>3</sup> Mastini Hardjoprakoso, *Bunga Rampai Kepustakawanan*. (Jakarta : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2005) hal 3.

dapat dimiliki dan dimanfaatkan selengkap dan sedini mungkin.

Perpustakaan merupakan pusat belajar sepanjang hayat yang dapat dikunjungi kapanpun oleh masyarakat.

2. Perlu terjaminnya pelestarian, pendayagunaan hasil karya terbitan nasional. Hasil karya suatu bangsa perlu dilestarikan, dikembangkan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya sehingga kesinambungan perkembangan bangsa dapat terjamin. Dengan didirikannya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia maka tugas pengumpulan dan pelestarian hasil budaya karya terbitan nasional dapat terjamin dengan didukung oleh UU serah simpan contoh terbitan (deposit act).

Pada awalnya, UU serah simpan ini memang belum ada, sehingga pengumpulan hasil terbitan nasional terkendala. Kemudian pada tahun 1990, Presiden Soeharto mensahkan UU RI No. 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa setiap penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan 1 (satu) kepada Perpustakaan Daerah di ibukota Propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan<sup>4</sup>. Namun, upaya pengumpulan terbitan nasional masih mengalami berbagai hambatan diantaranya kurangnya kesadaran para penerbit, khususnya penerbit pemerintah. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan apresiasi pemerintah maupun masyarakat terhadap arti pentingna pelestarian karya budaya

---

<sup>4</sup> Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, Bab II Pasal 2

dan perpustakaan bagi kemajuan dan peradaban bangsa<sup>5</sup>. Kondisi itu diperparah dengan adanya UU tentang pemerintahan daerah tahun 1999 yang mengalihkan Perpustakaan Nasional Provinsi (Perpusnasprov) ke dalam jajaran pemerintah provinsi menjadi Badan atau Kantor Perpustakaan. Dampaknya adalah aturan tentang kewajiban penerbit di provinsi menyerahkan produknya ke Perpusnasprov menjadi gugur. Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional sedang mengusahakan revisi UU Nomor 4 Tahun 1990, terutama mengubah nama Perpustakaan nasional Provinsi menjadi lembaga penggantinya<sup>6</sup>.

3. Perlu adanya pusat nasional koordinasi pertukaran informasi antar perpustakaan di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kelengkapan koleksi maka Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bertindak sebagai pusat koordinasi kerjasama perpustakaan dalam pemberian jasa informasi.

Perpustakaan Nasional menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan Unesco, Japan Foundation, Library Of Congress, Ford Foundation, The British Council, The British Library, Yayasan Kawedri, Keraton Surakarta, Dll.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh banyak pihak, adanya kertas kerja dari Mastini Hardjoprakoso dan juga Konferensi Perpustakaan serta pendirian perpustakaan sekolah atau lembaga menjadi masukan positif yang ditanggapi baik oleh pemerintah. Respon positif juga diberikan oleh Ibu Negara, Ibu Tien Soeharto yang secara khusus menyediakan lokasi untuk pendirian gedung Perpustakaan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Drs. Supriyanto, M. Si, 1 September 2008, di Jakarta.

<sup>6</sup> Sukarman (=Soekarman) Kertosedono, ...[et al.], *Seperempat Abad Perpustakaan Nasional 1980-2005*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2005), hal 29.

Nasional. Berawal dari kunjungan Ibu Tien dalam pameran surat kabar langka pada Oktober 1968 di Perpustakaan Museum Pusat, beliau meminta diantar ke tempat penyimpanan koleksi langka itu. Beliau terkejut ketika mengunjungi tempat tersebut ternyata pengap karena tidak berpendingin udara dan suram karena kurang penerangan<sup>7</sup>. Kemudian pada tahun 1971, Presiden Soeharto datang mengunjungi museum tersebut dan melakukan tindakan berupa pemberian dana untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan melalui induk organisasi pengelolanya yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kunjungan Presiden beserta Ibu Negara tersebut merupakan langkah yang menentukan bagi terbangunnya gedung Perpustakaan Nasional dan berpengaruh dalam penyusunan serta penandatanganan Surat Keputusan Menteri P&K pada tahun 1980. Akhirnya pada tanggal 17 Mei 1980 dibentuklah Perpustakaan Nasional di Lingkungan Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia Nomor 0164/0/1980 yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Indonesia, Daoed Yoesoef. Dalam keputusan itu ditetapkan bahwa Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang mengintegrasikan tugas, fungsi, personil, perlengkapan, arsip dan koleksi buku serta anggaran rutin dari Perpustakaan Museum Nasional, Museum Sejarah Sosial dan Politik, Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan kebudayaan serta Bidang Bibliografi dan Deposit pada Pusat Pembinaan

---

<sup>7</sup> Ibid., hal 7.



perpustakaan<sup>8</sup>. Dengan adanya Keputusan Menteri tersebut maka, secara sah di Indonesia telah berdiri sebuah Perpustakaan Nasional yang dapat digunakan untuk tempat melestarikan seluruh informasi ilmu pengetahuan dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

## **B. Lembaga-Lembaga Awal Pembentuk Perpustakaan Nasional RI**

Seperti telah diketahui, bahwa cikal bakal pendirian Perpustakaan Nasional Indonesia merupakan integrasi dari 4 jenis perpustakaan lain yang telah ada. Keempat lembaga tersebut adalah :

### **1. Perpustakaan Museum Nasional**

Merupakan perpustakaan tertua yang didirikan pada tahun 1778 dengan lokasi di Jl. Merdeka Barat No. 12. Sebagian besar koleksi dari perpustakaan ini meliputi ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan serta terdapat karya terbitan dari PBB. Selain itu, koleksi penting yang ada di perpustakaan itu adalah koleksi mengenai penerbitan-penerbitan Indonesia yang terdiri dari berbagai buku, majalah, surat kabar, peta-peta, gambar-gambar dan lukisan-lukisan sejak abad ke-19 hingga permulaan Perang Dunia II. Seluruh koleksi tersebut tersimpan di dalam sebuah ruangan yang tertutup bagi umum. Panjang ruangan adalah 60 meter dan lebar 12 meter. Buku-buku dan majalah yang terjilid maupun yang belum ditempatkan di rak-rak yang tingginya 2,75 meter dengan panjang masing-masing 6 meter. Sedangkan untuk peta di simpan

---

<sup>8</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 1980-1990 Tentang Perpustakaan, hal 192-195

di lemari kayu. Oleh karena koleksi yang dimiliki Perpustakaan Museum Pusat meliputi ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, maka perpustakaan itu dijadikan perpustakaan inti. Perpustakaan Museum Nasional dapat berkembang pesat berkat adanya kebijakan dari Pemerintah Hindia Belanda yang mewajibkan semua instansi (pemerintah dan swasta) mengirimkan hasil cetakannya kepada perpustakaan tersebut. Cara lain yang dilakukan untuk mengumpulkan koleksi adalah dengan penukaran penerbitan dan pembelian baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pada masa pendudukan Jepang, perpustakaan ini menerima penerbitan-penerbitan pemerintah Jepang seperti *Can Po*, buku-buku dan penerbitan berkala lainnya. Hingga tahun 1950 nama *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (KBGKW) tetap dipertahankan. Namun, kemudian diganti nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia.

Pada tahun 1962, lembaga itu diserahkan kepada pemerintah dan dimasukkan ke Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan karena koleksinya menyangkut kebudayaan Indonesia. Hingga sekarang, koleksi Perpustakaan Museum Nasional merupakan koleksi terbesar dan tak ternilai dari segi ilmu pengetahuan, khususnya tentang studi Indonesia sebelum Perang Dunia II<sup>9</sup>. Jumlah koleksinya mencapai 100.000 judul buku, 11.000 judul majalah, 1.341 judul surat kabar, dan 2.500 judul penerbitan PBB<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Mastini Hardjoprakoso, *Op.Cit.*, hal 16

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 172

## 2. Perpustakaan Sejarah, Politik dan Sosial (Perpustakaan SPS)

Perpustakaan SPS didirikan pada tahun 1952. Koleksi yang ada di perpustakaan itu berjumlah 78.000 eks yang meliputi bidang ilmu-ilmu sosial, termasuk politik dan perkembangan ekonomi serta dalam bidang hukum internasional, Undang-Undang Dasar berbagai negara, dan diplomasi. Awalnya, koleksi-koleksi tersebut dipilih dan disusun di Negeri Belanda oleh Arthur Lehning yang melaksanakan pemilihan koleksi dan mengirimkannya ke Indonesia melalui diplomasi ketika Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Perpustakaan ini diserahkan kepada pemerintah Indonesia oleh STICUSA yang merupakan suatu badan kerjasama dalam bidang kebudayaan antar Belanda dan Indonesia..

## 3. Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta

Didirikan pada tahun 1959, yang berfungsi sebagai perpustakaan rujukan daerah merangkap perpustakaan umum. Jumlah koleksi Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta adalah 15.000 eks. DKI Jakarta memiliki 5 perpustakaan daerah yang berada di tiap wilayah yang ada di DKI Jakarta.

## 4. Bidang Bibliografi dan Deposit, Pusat Pembinaan Perpustakaan.

Didirikan di Bandung pada tahun 1953 berdasarkan Surat Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan. Kantor Bibliografi Nasional (KBN) didirikan untuk mengumpulkan semua jenis terbitan Indonesia guna penyusunan Bibliografi

Nasional<sup>11</sup>. Namun, tujuan itu tidak dapat terwujud secara lengkap karena tidak adanya landasan hukum. Pada tahun 1955 kantornya dipindah ke Jakarta. Pengawasan KBN dilakukan oleh Biro Perpustakaan sejak tahun 1954. Kemudian pada 1967, didirikan Lembaga Perpustakaan sebagai pengganti Biro Perpustakaan. Perubahan nama kemudian terjadi lagi pada 1975 seiring dengan tugas dan fungsi baru yakni menjadi Pusat Pembinaan Perpustakaan di mana KBN dijadikan Bidang Bibliografi dan Deposit dari Pusat Pembinaan Perpustakaan. Pusat Pembinaan Perpustakaan ini merupakan salah satu unsur penting dalam pendirian Perpustakaan Nasional karena lembaga ini bertindak sebagai lembaga persiapan pembentukan Perpustakaan Nasional. Peran lembaga ini pun semakin besar ketika Perpustakaan Nasional dijadikan salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Bibliografi nasional merupakan tugas pokok dari setiap Perpustakaan Nasional di setiap negara yang meliputi penyusunan daftar semua terbitan nasional. Bibliografi nasional mempunyai peran ganda, yakni<sup>12</sup>:

- a. Sebagai sarana untuk mengadakan seleksi bahan pustaka;
- b. Untuk mengetahui jumlah produksi buku, baik terbitan pemerintah maupun swasta;
- c. Untuk mengetahui bidang ilmu pengetahuan apa yang belum tercakup dan kurang diperhatikan.

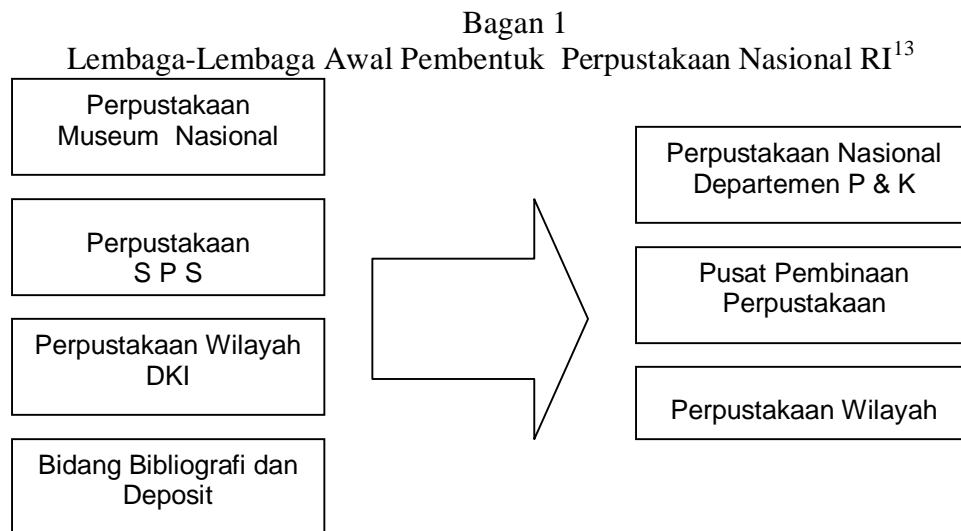
---

<sup>11</sup> Lasa Hs, *Kamus Istilah Perpustakaan*, (Yogyakarta : Gajah Madja Press, (1998), hal 10-11. Bibliografi adalah daftar literatur ilmu pengetahuan baik yang berupa buku, majalah, maupun tulisan lain yang mencakup studi tentang isi maupun hanya fisiknya yang disusun menurut sistem tertentu secara sistematis.

<sup>12</sup> Mastini Hardjoprakoso, *Op. Cit.*, Hal 30

Kelengkapan bibliografi nasional serta penyebarluasan informasi yang tersedia akan bermanfaat guna keperluan pengkajian lingkungan alam, kebudayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang upaya pembangunan tingkat nasional maupun tingkat daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai lembaga-lembaga awal pembentuk Perpustakaan Nasional RI dapat dilihat melalui bagai di bawah ini :



Keempat lembaga tersebut, diintegrasikan dalam Perpustakaan Nasional RI pada tahun 1980 yang merupakan lembaga di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena tiga dari empat unsur Perpustakaan Nasional tersebut merupakan perpustakaan yang berada dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka proses pengintegrasian menjadi Perpustakaan Nasional RI tidaklah sulit.

<sup>13</sup> [www.pnri.go.id](http://www.pnri.go.id) ("Masa Perkembangan Perpustakaan Nasional RI"), diakses pada tanggal 8 Februari 2009 pukul 16.06 wib.

### **C. Perpustakaan Nasional RI dalam Lingkungan Departemen P&K (1980-1989)**

Perpustakaan Nasional RI ketika berada dalam lingkungan Departemen P&K merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bidang kegiatannya terbatas pada kegiatan mengumpulkan, menyimpan, dan mendayagunakan bahan perpustakaan tertulis, tercetak, dan terekam hasil karya penerbit di Indonesia baik yang terbit di Indonesia maupun di luar negeri dan terbitan asing. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam Keputusan Menteri P&K Nomor 0220/0/1980, Perpustakaan Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. Sebagai pimpinan atau Kepala Perpustakaan Nasional yang baru berdiri, dilantiklah Mastini Hardjoprakoso yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pendirian Perpustakaan Nasional.

Perpustakaan Nasional yang baru berdiri itu harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik agar dapat menghimpun koleksi yang ada. Koleksi ini diperlukan untuk memberikan jasa informasi, jasa rujukan dan jasa bibliografi. Sehubungan dengan hasil integrasi dari empat, maka jenis koleksi, tugas, fungsi, personel, serta anggaran rutin juga diintegrasikan. Berbagai hal yang harus diintegrasikan inilah yang harus diselesaikan dengan baik.

Proses pengintegrasian empat lembaga perpustakaan menjadi Perpustakaan Nasional membutuhkan waktu hingga tahun 1989. Pada tahun 1983, dipilihlah satu lokasi yang strategis untuk pendirian sebuah kompleks Perpustakaan Nasional atas prakarsa Ibu Tien Soeharto. Lokasinya terletak di Jalan Salemba Raya 28, sebuah lokasi milik

Yayasan Harapan Kita yang berupa sebuah gedung kuno eks sekolah HBS Koning Willem III dan sedang digunakan oleh TNI AD sebagai kantor Jawatan Kesehatan. Alasan pemilihan tempat tersebut untuk mewadahi seluruh kegiatan Perpustakaan Nasional yang masih terpecah di tiga lokasi berbeda, yaitu di Jalan Merdeka Barat 12 (Museum Nasional) untuk menyimpan koleksi Museum Nasional, Jalan Merdeka Selatan 11 sebagai lokasi penyimpanan koleksi Museum SPS, Perpustakaan Wilayah DKI Jakarta dan Bidang Bibliografi. Satu lokasi lainnya adalah di Jalan Imam Bonjol 1 yang merupakan Museum Naskah Proklamasi sebagai tempat kerja Kepala Perpustakaan Nasional, Bagian Tata Usaha dan beberapa unit teknis.

Lokasi baru yang disediakan untuk kompleks Perpustakaan Nasional belum dapat digunakan karena masih harus mengalami proses pembangunan gedung dan berbagai sarana pelengkap lainnya. Penyelesaian bangunan fisik gedung PNRI dengan merenovasi gedung bekas HBS-KW III dilakukan pada tahun 1986 dan dilanjutkan dengan pembangunan gedung II yang terdiri dari 3 blok pada Maret 1987-Oktober 1988, serta penataan gedung dengan perlengkapannya hingga akhir tahun 1988. Pada tahun 1988 juga dilakukan pemindahan 5 bidang/bagian bersama pimpinan dari Jl. Imam Bonjol 1 dan pemindahan seluruh koleksi dari Jl. Merdeka Barat 12 dan Jl. Merdeka Selatan 11 ke Jl. Salemba Raya 28A hingga bulan Februari 1989. Setelah sebagian besar koleksi terintegrasi dalam satu tempat maka pada 11 Maret 1989, gedung di Jl. Salemba 28A yang merupakan milik Yayasan Harapan Kita diserahkan kepada negara dan bangsa Indonesia untuk PNRI yang ditandai dengan peresmian gedung oleh Presiden Soeharto.

Walaupun seluruh koleksi telah diintegrasikan dalam satu kompleks, namun keberadaan bangunan dan lahan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 11 masih tetap dipertahankan sebagai bagian integral Perpustakaan Nasional. Saat ini, lokasi tersebut digunakan sebagai tempat pelayanan terbuka koleksi Perpustakaan Nasional yang sebagian besar merupakan koleksi terbaru serta merupakan lokasi Deputi Pembinaan dan Pengembangan Pustakawan.

Selain melakukan pembenahan fisik bangunan, selama kurun waktu 1980 hingga 1989 pengembangan Perpustakaan Nasional juga dilakukan dalam segi peningkatan mutu tenaga pegawai. Pengembangan dan peningkatan tenaga dengan mengirim beberapa kepala bidang/bagian dan staff untuk studi banding, pelatihan otomasi dan keterampilan. Jumlah pegawai dari 4 lembaga pembentuk PNRI pada masa awal pengintegrasian berjumlah 170 orang. Kemudian penambahan pegawai baik lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu maupun dari sekolah menengah umum/teknik mencapai 150%. Program pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk tenaga teknis perpustakaan dan penata bibliografi setiap tahunnya berjumlah 30 orang. Perpustakaan Nasional juga melakukan berbagai upaya pengembangan lainnya yakni melalui :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk program kegiatan berupa kendaraan roda empat dan roda dua, peralatan administrasi kantor dan peralatan reproduksi seperti beberapa jenis kamera dan alat baca mikro, serta perlengkapan percetakan dan penjilidan.
- b. Pengintegrasian teknis perpustakaan dengan menyeragamkan cara

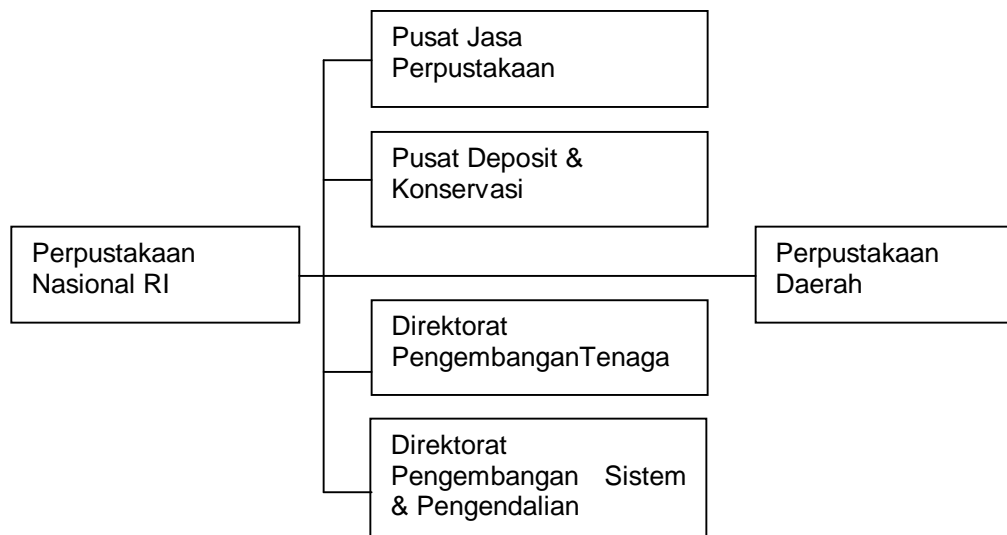


- penguraian dan klasifikasi bahan pustaka terbitan baru.
- c. Pemasyarakatan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan cara pameran serta ceramah di 5 perguruan tinggi di Jawa.
  - d. Penyebarluasan informasi dengan menerbitkan bahan-bahan rujukan seperti katalog subyek, bibliografi nasional subyek, indeks dan sari literatur. Bahan-bahan tersebut dikirim ke berbagai instansi/lembaga di dalam maupun luar negeri sebagai program tukar-menukar penerbitan.
  - e. Penyelenggaraan temu ilmiah tingkat nasional mengenai sistem jaringan, sistem ISBN/KDT, format komputer INDOMARC. Selain itu juga berpartisipasi dalam pertemuan tingkat regional dan internasional.
  - f. Pengadaan peralatan baru untuk menunjang peningkatan kegiatan program berupa penambahan komputer untuk preservasi (pelestarian) dan koleksi naskah kuno (donasi dari *Ford Foundation*), pemasangan detektor di ruang baca untuk pengamanan buku-buku langka serta pemasangan prosesor baru untuk keperluan reproduksi bentuk mikrofilm.

Perpustakaan Nasional ketika berada dalam lingkungan Departemen P & K memiliki struktur organisasi yang mencerminkan tugas dan fungsinya dengan adanya pusat jasa perpustakaan, pusat deposit dan konservasi, direktorat pengembangan tenaga dan juga direktorat pengembangan sistem dan pengendalian. Selain itu, terdapat pula hubungan koordinasi antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Daerah. Untuk lebih jelas mengenai struktur lembaga Perpustakaan

Nasional dalam Lingkungan Departemen P & K dapat dilihat melalui bagan di bawah ini :

Bagan 2  
Struktur Organisasi Perpustakaan Nasional dalam Lingkungan Departemen P & K<sup>14</sup>



Seiring dengan kemajuan yang dicapai oleh Perpustakaan Nasional maka pada tahun 1989 status kelembagaan Perpustakaan Nasional mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

<sup>14</sup> [www.pnri.go.id](http://www.pnri.go.id) (“Masa Perkembangan Perpustakaan Nasional RI”), diakses pada tanggal 8 Februari 2009 pukul 16.06 wib.

#### **D. Perpustakaan Nasional RI Sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)**

Sejak terbitnya Keppres RI Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional tertanggal 6 Maret 1989, status kelembagaan Perpustakaan Nasional ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)<sup>15</sup> yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Perubahan status kelembagaan ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Perpustakaan Nasional sebagai institusi yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Penambahan tugas PNRI sebagai pengembang dan pembina perpustakaan juga dilandasi oleh adanya Pusat Pembinaan Perpustakaan yang berada dalam Bidang Bibliografi dan Deposit sebagai salah satu unsur lembaga PNRI.

Perlunya keberadaan lembaga pengembang dan pembina perpustakaan disebabkan oleh rendahnya minat baca rakyat Indonesia dan juga kondisi geografis Indonesia yang luas dengan beragam suku, agama dan budayanya<sup>16</sup>. Tugas inilah yang sejatinya harus dioptimalkan oleh PNRI guna terciptanya suatu koleksi bahan pustaka dari seluruh daerah di Indonesia yang dapat diwariskan dan dimanfaatkan secara optimal dalam kurun waktu yang tak terbatas. Untuk mendukung segala pengurusan

---

<sup>15</sup> Keppres RI Nomor Nomor 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) pasal 1. Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Lembaga Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dari Presiden.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Drs. Syamsul Bahri, pada tanggal 6 Januari 2009, di Jakarta.

administrasi, kepegawaian, dan keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok PNRI, sumber pendanaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebagai LPND, Perpustakaan Nasional RI juga melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden. Inilah yang salah satu pembeda antara PNRI sebagai LPND dengan Perpustakaan Nasional ketika berada dalam lingkungan Departemen P&K. Perpustakaan Nasional sebagai LPND dipimpin oleh Kepala Perpustakaan Nasional yang berpangkat jabatan eselon 1a. Adalah Mastini Hardjoprakoso yang menjadi Kepala PNRI meneruskan kepemimpinan yang ia jalankan sebelumnya. Untuk mendukung segala program kerja yang diamanatkan, Mastini Hardjoprakoso menyusun struktur organisasi PNRI yang dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :



<sup>17</sup> [www.pnri.go.id](http://www.pnri.go.id) ("Masa Perkembangan Perpustakaan Nasional RI"), diakses pada tanggal 8 Februari 2009 pukul 16.06 wib.

Pengembangan dan pembinaan yang menjadi tugas Perpustakaan Nasional adalah meliputi pembinaan dalam hal koleksi bahan pustaka, sumber daya manusia (pustakawan), gedung dan ruangan, anggaran, sarana dan prasarana, mitra kerja sama, perabot dan perlengkapan, layanan perpustakaan, serta masyarakat pemakai. Segala kegiatan tersebut dapat dicapai melalui berbagai kerjasama dan sistem jaringan informasi oleh berbagai pihak yang saling menguntungkan. Sedangkan untuk pengembangan, Perpustakaan Nasional RI melakukan berbagai macam upaya untuk menambah unit perpustakaan dan seluruh sarana dan fasilitas pendukung operasional perpustakaan yang ada.

Untuk menjalankan segala tugas yang diamanatkan, Perpustakaan Nasional melakukan berbagai upaya pembenahan dan pengembangan sistem serta perangkat kegiatan. Upaya pembenahan yang dilakukan meliputi pengintegrasian seluruh koleksi yang ada dalam satu lokasi di Jalan Salemba Raya, kemudian pengembangan sistem penyimpanan dan penomoran koleksi sesuai dengan standard internasional. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan dan melengkapi koleksi bahan pustaka dari berbagai bidang atau disiplin ilmu. Kerjasama yang dilakukan dapat melibatkan dua perpustakaan atau lebih. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga mengupayakan sistem jaringan informasi yang melibatkan organisasi lain yang bergerak dalam bidang informasi yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri<sup>18</sup>. Beberapa pihak yang menjalin

---

<sup>18</sup> Sukarman (=Soekarman) Kertosedono, ...[et al.], *Seperempat Abad Perpustakaan Nasional 1980-2005*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2005), hal 34

kerjasama antara lain adalah Sinematek Indonesia, Perpustakaan Nasional Negeri Belanda (*Koninklijke Bibliothek*), Perpustakaan Negeri Australia (*National Library of Australia*), Perpustakaan Nasional Malaysia dan perpustakaan berbagai negara lain baik yang ada di kawasan Asia maupun di Eropa.